

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdullah, Rozali, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994.
- Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989.
- Budiman, Arief, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hadjon, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, gajah mada press, Jogjakarta, 1992.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Ibrahim, Johny, *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Cetakan IV, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Richard Eddy,. *Aspek Legal Properti*, Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Santoso, Urip, *hukum agraria kajian komprehensif*, kencana, Jakarta, 2012.
- Situmorang, Victor, dan Soedibyso, *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Tjandra, W Riawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah No. SK.DA.II/HGB/269/1/IV/1985, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah No. SK.DA.II/HGB/1325/1/XXXII/4058/1986. Tentang pemberian izin pengelolaan berupa HGB No. 01 dan No. 02/kel. Tegalrejo kepada PT. Panca Arga Agung

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 09/G/2011/PTUN-SMG.

Internet :

<https://advosolo.wordpress.com/2012/07/04/kekuasaan-kehakiman-di-indonesia/>,
diakses pada : Jumat/26/02/2016 pkl. 22.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11210/sengketa-kepemilikan-tanah>,
diakses pada : Jumat/26/02/2016 pkl. 22.00 WIB.